

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi: Analisis Faktor Keberhasilan dan Prinsip Berkelanjutan

La Ode Abdul Harlan^{1*}, Wahyudin Sunubi², Rian Fauzy Saputra Ode³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari*

*e-mail korespondensi penulis: harlan@umkendari.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of tourism management policies in Wakatobi Regency, focusing on success factors and sustainable management principles. Using a qualitative approach with observation, in-depth interviews, and documentation, this research analyzes policy implementation through Edward III's model: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that policy success depends heavily on effective inter-agency communication, adequate resource availability, implementer commitment, and supportive bureaucratic structures. Key sustainable tourism principles include local community empowerment, culture-based services, and environmental conservation. While Wakatobi has been designated as a National Strategic Tourism Area with significant marine biodiversity potential, challenges remain in community participation, digital promotion optimization, and environmental oversight. The study concludes that effective tourism policy implementation requires stronger collaboration between the government, private sector, and local communities to ensure sustainable and inclusive tourism development that benefits all stakeholders while preserving environmental and cultural heritage.

Keywords: policy implementation, tourism management, Wakatobi, sustainable development, community participation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi dengan fokus pada faktor-faktor keberhasilan dan prinsip pengelolaan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan melalui model Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi antar lembaga yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Prinsip pariwisata berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, pelayanan berbasis budaya, dan pelestarian lingkungan. Meskipun Wakatobi telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang signifikan, tantangan masih terdapat dalam partisipasi masyarakat, optimalisasi promosi digital, dan pengawasan lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata yang efektif memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif yang menguntungkan semua pemangku kepentingan sambil melestarikan warisan lingkungan dan budaya.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan pariwisata, wakatobi, pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat.

1. Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan pariwisata menjadi kewenangan pemerintah daerah yang memerlukan strategi implementasi kebijakan yang tepat. Kabupaten Wakatobi, sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), memiliki potensi luar biasa dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan warisan budaya yang kaya.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pariwisata menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Tata kelola pariwisata yang efektif memerlukan kolaborasi aktif di antara seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana ditegaskan oleh kerangka kerja kompleks yang dibutuhkan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan (Delgado et al., 2021). Kurangnya sinergi antarlembaga sering kali menghambat terbentuknya kebijakan yang responsif dan terpadu, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang krusial (Dahles et al., 2019). Tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat lokal, strategi pengembangan pariwisata berisiko mengabaikan dinamika sosial-budaya setempat, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan realitas di lapangan (Cockburn-Wooten et al., 2018). Oleh karena itu, memahami hambatan-hambatan struktural dan sosial dalam tata kelola pariwisata merupakan langkah penting untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang bermakna, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat lokal (Bennike & Nielsen, 2023).

Tren pariwisata berkelanjutan semakin mendapatkan pengakuan global sebagai pendekatan strategis yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pariwisata berkelanjutan telah berkembang menjadi paradigma dominan dalam sektor pariwisata kontemporer, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global yang mengintegrasikan tiga pilar utama keberlanjutan, yaitu kelangsungan ekonomi, integritas ekologis, dan keadilan sosial (Sharpley, 2020). Kerangka tripartit ini dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal, sambil secara efektif meminimalkan dampak ekologis negatif (Koenig-Lewis et al., 2021). Lebih lanjut, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan peran krusial pariwisata berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Torkington et al., 2020). Hal ini memperkuat argumen bahwa realisasi

keberlanjutan yang sejati dalam pariwisata memerlukan integrasi yang cermat antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial.

Wakatobi memiliki keunikan sebagai wilayah yang memadukan status sebagai Taman Nasional dan kawasan pariwisata strategis. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi tantangan signifikan dalam upaya menyelaraskan kepentingan konservasi dengan pengembangan pariwisata. Pandangan tradisional terhadap konservasi sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi yang mendorong ekspansi sektor pariwisata, sehingga menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Rasoolimanesh et al., 2019). Masyarakat yang bermukim di sekitar situs warisan budaya cenderung mempersepsikan pariwisata sebagai ancaman terhadap pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan, terutama akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh arus kunjungan yang meningkat, seperti komersialisasi budaya dan degradasi lingkungan (Rasoolimanesh et al., 2019). Lebih lanjut, keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Eksklusi masyarakat dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memicu resistensi terhadap inisiatif pariwisata, yang pada gilirannya menghambat upaya konservasi (Lyon & Hunter-Jones, 2019; Stylidis, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang mampu menyelaraskan tujuan konservasi dengan strategi pengembangan pariwisata secara inklusif, guna memperkuat dukungan lokal dan mendorong praktik pariwisata yang berkelanjutan (Cheer et al., 2019). Gap penelitian teridentifikasi pada minimnya kajian komprehensif tentang implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata yang mengintegrasikan analisis faktor keberhasilan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan di kawasan dengan status ganda seperti Wakatobi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi dengan fokus pada faktor-faktor keberhasilan dan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Novelty penelitian terletak pada pendekatan holistik yang mengombinasikan model Edward III dalam analisis implementasi kebijakan dengan konsep pariwisata berkelanjutan dalam konteks kawasan konservasi yang memiliki status sebagai KSPN.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang dipilih karena statusnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Taman Nasional dengan keanekaragaman hayati tinggi.

Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, terdiri dari delapan informan kunci: Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kabid Program Dinas Pariwisata, pemerhati pariwisata, tokoh masyarakat, pengelola destinasi, dan dua orang masyarakat lokal. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam pengelolaan pariwisata dan pemahaman mendalam tentang kondisi lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: observasi partisipatif untuk mengamati implementasi kebijakan di lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci, dan dokumentasi berupa peraturan daerah, data statistik, dan dokumen perencanaan. Wawancara dilakukan selama bulan Mei 2025 dengan durasi 45-90 menit per informan.

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis menggunakan kerangka model Edward III untuk aspek implementasi kebijakan dan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Triangulasi data dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan model Edward III, implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Wakatobi dianalisis melalui empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi Dinas Pariwisata Wakatobi telah mengembangkan strategi komunikasi multi-platform yang meliputi sosialisasi langsung, pemanfaatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai ujung tombak komunikasi di tingkat desa, dan aplikasi e-Tour Wakatobi sebagai pusat informasi digital. Kepala Dinas Pariwisata menyatakan: Pemerintah daerah selalu mengkampanyekan pariwisata melalui berbagai cara, mulai dari sosialisasi langsung hingga platform digital.

Namun, efektivitas komunikasi masih menghadapi kendala dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Dahles et al., 2019; Movono & Hughes, 2020; Ramkissoo, 2020), keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam proses perencanaan kebijakan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui integrasi berbagai perspektif, sehingga berkontribusi pada hasil kebijakan yang lebih inklusif, seimbang, dan efektif.

Sumber Daya

Wakatobi memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang luar biasa, termasuk 750 spesies karang dan 942 spesies ikan di wilayah lautnya. Tokoh masyarakat menegaskan: Sumber daya alam pariwisata kita banyak, tinggal bagaimana kemampuan sumber daya manusianya untuk mengelola pariwisatanya.

Tantangan utama terletak pada kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Data menunjukkan penurunan drastis alokasi APBD sektor pariwisata dari Rp

45,6 miliar (2021) menjadi Rp 9,1 miliar (2025). Kondisi ini memerlukan optimalisasi melalui kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah pusat.

Disposisi

Sikap positif terhadap kebijakan pariwisata ditunjukkan oleh komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan: Semua kebijakan daerah terkait pariwisata berdampak positif bagi perkembangan taraf hidup masyarakat."

Namun, masih diperlukan sistem evaluasi yang terstruktur dan penerapan reward-punishment untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksana kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi telah disusun sesuai regulasi yang berlaku dengan upaya koordinasi lintas sektor. Namun, koordinasi antara pemerintah daerah, Balai Taman Nasional, dan masyarakat hukum adat masih menghadapi tantangan ego sektoral yang perlu diatasi melalui forum koordinasi reguler.

3.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemerintah telah mengembangkan program pemberdayaan melalui pelatihan SDM rutin, pembentukan Pokdarwis, dan pengembangan UMKM. Kepala Dinas menyatakan: Harapan kedepan, kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pariwisata mencapai 100% melalui pelatihan SDM dan ekonomi kreatif.

Terdapat berbagai komunitas seperti Komunitas Nelayan Wangi-Wangi (Komanangi), mitra konservasi, dan Forum UMKM Wakatobi yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, jangkauan program masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah kepulauan.

Pelayanan Berbasis Budaya Lokal

Wakatobi mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pelayanan pariwisata melalui upacara adat, tarian tradisional seperti Lariangi dan Sajo Moane, serta kuliner khas. Peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Pelestarian Lingkungan

Sebagai Taman Nasional dengan luas 1.390.000 ha, Wakatobi menerapkan zonasi pemanfaatan yang ketat untuk menjaga keseimbangan konservasi dan pariwisata. Kepala Dinas menekankan: Komitmen bersama untuk menjaga melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan tanpa ego sektoral.

Implementasi master plan kawasan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk WWF Indonesia dalam penerapan standar Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC), menunjukkan keseriusan dalam pelestarian lingkungan.

4. Simpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi menunjukkan kemajuan positif namun belum optimal. Faktor-faktor keberhasilan implementasi meliputi komunikasi multi-platform yang perlu diperluas jangkauannya, sumber daya alam dan budaya yang melimpah namun terkendala SDM dan anggaran, disposisi positif yang memerlukan sistem evaluasi terstruktur, dan struktur birokrasi yang membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor.

Prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan telah diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, pelayanan berbasis budaya, dan pelestarian lingkungan, namun masih perlu perluasan jangkauan dan penguatan kapasitas. Keberhasilan jangka panjang memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam kerangka pariwisata berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Dinas Pariwisata Wakatobi, dan seluruh informan yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bennike, R. B., & Nielsen, M. R. (2023). Frontier Tourism Development and Inequality in the Nepal Himalaya. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(4), 773–794. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2174129>
- Cheer, J. M., Milano, C., & Novelli, M. (2019). Tourism and Community Resilience in the Anthropocene: Accentuating Temporal Overtourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(4), 554–572. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1578363>
- Cockburn-Wooten, C., McIntosh, A., Smith, K. A., & Jefferies, S. (2018). Communicating Across Tourism Silos for Inclusive Sustainable Partnerships. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(9), 1483–1498. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1476519>
- Dahles, H., Khieng, S., Verver, M., & Manders, I. (2019). Social Entrepreneurship and Tourism in Cambodia: Advancing Community Engagement. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(6), 816–833. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1706544>



- Delgado, A. T., Palomeque, F. L., Sanz, B. E., & Font, X. (2021). Monitoring Sustainable Management in Local Tourist Destinations: Performance, Drivers and Barriers. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), 1672–1693. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1937190>
- Koenig-Lewis, N., Palmer, A., & Asaad, Y. (2021). Linking Engagement at Cultural Festivals to Legacy Impacts. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(11–12), 1810–1831. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1855434>
- Lyon, A., & Hunter-Jones, P. (2019). Critical Discourse Analysis and the Questioning of Dominant, Hegemonic Discourses of Sustainable Tourism in the Waterberg Biosphere Reserve, South Africa. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 974–991. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1551896>
- Movono, A., & Hughes, E. D. (2020). Tourism Partnerships: Localizing the SDG Agenda in Fiji. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2318–2332. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1811291>
- Ramkissoon, H. (2020). Perceived Social Impacts of Tourism and Quality-of-Life: A New Conceptual Model. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(2), 442–459. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1858091>
- Rasoolimanesh, S. M., Taheri, B., Gannon, M., Vafaei-Zadeh, A., & Hanifah, H. (2019). Does Living in the Vicinity of Heritage Tourism Sites Influence Residents' Perceptions and Attitudes? *Journal of Sustainable Tourism*, 27(9), 1295–1317. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1618863>
- Sharpley, R. (2020). Tourism, Sustainable Development and the Theoretical Divide: 20 Years On. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(11), 1932–1946. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1779732>
- Stylidis, D. (2018). Residents' Place Image: A Cluster Analysis and Its Links to Place Attachment and Support for Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(6), 1007–1026. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1435668>
- Torkington, K., Stanford, D., & Guiver, J. (2020). Discourse(s) of Growth and Sustainability in National Tourism Policy Documents. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(7), 1041–1062. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1720695>